

557

STRATEGI DAN KENYATAAN PEN- DIDIKAN DAN PEMBANGUNAN DI KENYA DAN TANZANIA*

Sekitar 10 tahun yang lalu, setelah tinggal di Kenya selama dua tahun, saya menulis:

"Dunia pendidikan Kenya sedang dalam transisi karena masyarakatnya itu sendiri berubah dengan cepatnya sementara Kenya memutuskan unsur budaya Afrika manakah akan diperkuat, unsur-unsur Eropa mana akan diterima atau ditolak, dan apakah komponen-komponen keduanya dapat disatukan dalam suatu pola yang baru dan unik. Kebudayaan Afrika masih dalam proses penyusunan dan orang terus mencari cara untuk memadukan tradisi yang bersifat komunal, spiritual dan mengayomi dengan etika Barat yang ilmiah, sekuler dan individual. Ini meliputi pemanfaatan sekolah-sekolah untuk menciptakan persatuan nasional dan menjadikan pendidikan suatu agen untuk membangun suatu masyarakat baru, dan bersamaan dengan itu perjuangan untuk menemukan pola dan struktur dasar masyarakat itu."

Pada waktu saya membaca kembali kata-kata itu, persoalan-persoalan yang saya ajukan itu terasa terlalu pasti dan terlalu rapi untuk suatu masyarakat yang begitu cair, begitu pragmatis dan begitu resisten terhadap ideologi doktriner seperti Kenya. Namun persoalan-persoalan yang diajukan itu cukup nyata dan memberikan fokus serta arah kepada suatu kunjungan kembali pada tahun 1977. Dan oleh sebab kebijaksanaan sosial dan pendidikan Presiden Nyerere sejak 1967 menimbulkan pembicaraan yang begitu luas, rupanya lebih luas di luar daripada di Afrika, saya juga mengunjungi Tanzania dalam usaha untuk melihat kenyataan di belakang kebijaksanaan itu. Dalam karangan ini pertama saya akan mencoba menunjukkan bahwa kedua negara itu pada tahun-tahun sesudah merdeka menganut strategi pendidikan yang serupa. Kemudian didokumentasikan meningkatnya perbedaan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan sosial, politik dan pendidikan menyusul

* Diambil dari Ernest Stabler, "Kenya and Tanzania: Strategies and Realities in Education and Development," dalam *African Affairs* (1978), hal. 33-56, oleh Bambang WALGITO.

Deklarasi Arusha, yang pada gilirannya menjadi dasar untuk membicarakan perkembangan pendidikan, baik formal maupun informal, di masing-masing negara belakangan ini. Disajikan beberapa perbandingan mengenai kebijaksanaan pendidikan dan hasil-hasilnya, tetapi ini tidak dilakukan dengan menggunakan seperangkap kriteria yang dibatasi dengan tegas. Karangan diakhiri dengan suatu bagian singkat yang memaparkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi Kenya dan Tanzania dalam implementasi sasaran-sasaran mereka.

KEBIJAKSANAAN-KEBIJAKSANAAN PARALEL

Pada tahun-tahun sesudah Kemerdekaan (Tanzania, waktu itu Tanganyika, tahun 1961 dan Kenya tahun 1963) kedua negara itu mempunyai banyak persamaan, dan pembangunan ekonomi serta pendidikan mereka, kalau tidak pembangunan politik mereka, didasarkan atas strategi dan prioritas-prioritas yang sebagian besar sama. Ketika bendera-bendera nasional menggantikan bendera Union Jack (Inggeris), rakyat Kenya, Tanganyika dan Uganda ramai-ramai bicara tentang kemerdekaan serta federasi dan mengira bahwa atas dasar Organisasi Dinas Bersama Afrika Timur dari jaman kolonial dapat dibangun suatu Federasi, dan kemudian suatu Pasaran Bersama. Ketiga negara itu juga mempunyai aspirasi dan tujuan-tujuan bersama, yaitu menghapus ketidaksamaan-ketidaksamaan rasial rezim kolonial, mendidik dan melatih tenaga kerja kelas menengah dan atas, mempribumikan pemerintah dan aparaturnya, dan menarik bantuan luar negeri. Tetapi yang paling penting ialah kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat. Sessional Paper Kenya No. 10 tahun 1965, *African Socialism and Its Application to Planning in Kenya*, yang dirancang oleh seorang ahli ekonomi asing, menjadi dasar bagi kebijaksanaan perencanaan, dan tekanannya atas pertumbuhan adalah jelas.

"Kebijaksanaan yang paling penting ialah meletakkan dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat. Masalah-masalah lain yang mendesak seperti Afrikanisasi ekonomi, pendidikan, pengangguran, pelayanan-pelayanan kesejahteraan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan propinsi harus ditangani dengan cara yang tidak membahayakan pertumbuhan."¹

Demikianpun Rencana Pembangunan Tanzania untuk periode 1961-1964, yang sebagian besar dirancang oleh orang-orang Inggeris, menyerukan "suatu konsentrasi pada proyek-proyek ekonomi yang diharapkan mendatangkan hasil-hasil yang paling cepat dan paling besar di masa depan yang dekat"; dan ia juga sangat mengandalkan bantuan luar negeri. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ini dan untuk melaksanakan pembangunan bangsa di segala

¹ Republic of Kenya, *African Socialism and Its Application to Planning in Kenya* (Nairobi:

bidang, Kenya dan Tanzania menaruh kepercayaan dan uang mereka pada pendidikan. Masalah-masalahnya sudah barang tentu besar sekali. Misalnya suplai tenaga kerja tingkat atas: pada tahun 1964 suatu survei Kenya mengungkapkan betapa sedikitnya orang Afrika dalam profesi-profesi: 36 dokter, 20 insinyur listrik, 17 dosen dan 7 ahli ekonomi.¹ Di Tanganyika pada tahun 1962 hanya terdapat 9 dokter hewan, 2 ahli hukum dan 1 insinyur sipil Afrika.² Kebijakan pendidikan dan prioritas-prioritas mengikuti tujuan-tujuan nasional: suatu sistem yang tunggal dan terpadu menggantikan sekolah-sekolah yang terpisah berdasarkan ras; dan serangkaian ujian memungkinkan kaum muda Afrika menaiki jenjang pendidikan dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah dan ke universitas di dalam maupun di luar negeri.

Pada waktu belum ada masalah lulusan sekolah dan semua lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi mempunyai kepastian akan mendapat pekerjaan di sektor pemerintah maupun swasta, pendidikan memancarkan suatu optimisme. Tom Mboya mengorganisasi pengiriman mahasiswa-mahasiswa lewat udara ke bermacam-macam perguruan tinggi di Amerika Serikat, dan Menteri Pendidikan Tanzania mengungkapkan optimismenya untuk periode mendatang dalam pidato anggarannya tahun 1964: "Suatu prospek baru yang besar terbuka bagi kita dan kita penuh harapan untuk hari depan." Dengan bantuan luar negeri dan banyak guru asing, pendidikan menengah diberi prioritas yang tinggi. Rencana-rencana swadaya meningkatkan jumlah sekolah dasar dan menengah, sehingga pada tahun 1966 sekolah-sekolah menengah Harambee (swadaya masyarakat) melebihi jumlah sekolah negeri dan sekolah bersubsidi (266 lawan 199).³ Kenyataannya kehausan akan pendidikan menengah di Kenya adalah begitu besar sehingga pemerintah wajib membantu, bukan menghambat, gerakan Harambee itu. Di Tanzania jumlah murid yang ditampung di sekolah-sekolah menengah melebihi rencana perluasan, biarpun dianut suatu kebijaksanaan pengendalian. Pengembangan pendidikan teknik, perluasan institut-institut pendidikan guru, dan penampungan lebih banyak mahasiswa pada bagian-bagian Universitas Afrika Timur merupakan prioritas-prioritas lain. Dalam bahasa perencanaan tenaga kerja (manpower), sasaran-sasaran ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, dan pinjaman-pinjaman diperoleh dari Asosiasi Pembangunan Internasional Bank Dunia untuk membiayai pembangunan sekolah dan perguruan tinggi. Pendek kata, pemerintah memandang pendidikan sebagai

1 Republic of Kenya, *High-Level Manpower Requirements and Resources in Kenya* (Nairobi: Government Printer, 1965)

2 *High Level Manpower Requirements and Resources in Tanganyika* (Dar es Salam: Government Printer, 1963), hal. 33-36

benih pembangunan ekonomi, dan bagi kaum muda dan orang tua mereka ia adalah kunci kesempatan dan kemajuan.

Usaha-usaha pertumbuhan dan perluasan yang menggembirakan ini dibarengi pembaharuan kurikulum. Matematika dan ilmu pengetahuan baru, yang waktu itu amat disanjung-sanjung di Amerika Serikat dan Inggris sebagai inovasi, mulai diajarkan sebagai proyek-proyek perintis di beberapa sekolah dasar dan menengah. Kebijakan bahasa untuk sekolah dasar juga dibicarakan secara panjang lebar dan sebagai hasilnya Tanzania menetapkan Swahili dan Kenya Inggris sebagai bahasa pengantar. Usaha untuk mempribumikan kurikulum mengambil berbagai bentuk, dari revisi silabus geografi dan sejarah agar lebih menekankan lingkungan dan pengalaman lokal dan nasional maupun regional Afrika sampai penulisan teks bahasa dan sastra oleh pengarang-pengarang Afrika. Sekolah-sekolah menengah model Grammar School dan Public School di Inggris mulai mengajarkan pertanian, seni industri, ilmu pengetahuan dalam negeri dan ilmu dagang, sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman IDA. Juga mulai diadakan pembicaraan-pembicaraan untuk mengganti Sindikat Cambridge dengan Dewan Ujian Afrika Timur yang mengatur ujian-ujian tingkat biasa dan tingkat lanjutan. Dan di kedua negara itu sekolah-sekolah semakin menjadi alat untuk membina rasa kebangsaan dan rasa persatuan serta maksud nasional pada kaum muda.

STRATEGI-STRATEGI BERBEDA

Dengan munculnya *Deklarasi Arusha, Pendidikan untuk Berdikari dan Sosialisme dan Pembangunan Pedesaan* pada tahun 1967, perbedaan ideologi antara Kenya dan Tanzania menjadi jelas. Dokumen-dokumen ini memperkuat strategi dan mengukuhkan kembali strategi yang dicanangkan oleh Nyerere sebelumnya tetapi hasilnya tak seberapa. Pada dasawarsa 1960-an sejumlah kecenderungan dalam masyarakat Tanzania meyakinkan Nyerere bahwa diperlukan suatu komitmen yang lebih kuat akan sosialisme;¹ kecenderungan-kecenderungan itu antara lain ialah suatu tendensi oligarki dan otoriter yang semakin kuat di kalangan pemimpin TANU dan meningkatnya stratifikasi kelas di kota-kota. Tetapi Pemerintah Tanzania belum mengembangkan suatu kebijaksanaan sosial jangka panjang yang sistematis. Pada tahun 1966 Nyerere sampai pada kesimpulan yang kemudian diungkapkannya bahwa "kendati dicapai beberapa kemajuan ekonomi dan kendati kita masih menyebutkan sasaran-sasaran sosialis, bangsa kita dalam kenyataan hanyut tanpa arah ... sebagai keseluruhan kita sudah menyimpang dari tujuan

1 Untuk analisa yang lebih mendalam tentang munculnya sosialisme Tanzania lihat Cranford

utama sosialisme, yaitu persamaan manusia, martabat manusia dan pemerintahan oleh seluruh rakyat".¹ Secara lebih terperinci ia berpendapat bahwa faktor utama penyimpangan ini ialah dua sikap yang meresapi pemerintah: suatu anggapan bahwa Tanzania bisa makmur secara ekonomi hanya kalau mendapat bantuan asing, dan meningkatnya keserakahan kapitalis di kalangan rekan-rekan politiknya dan pegawai negeri.

Rencana Pembangunan 1965-1969 memberikan prioritas tinggi kepada pendidikan menengah dan perguruan tinggi, dan secara demikian membentuk sekelompok orang muda yang mengharap akan menikmati kehidupan dan gaji di kota-kota yang sesuai dengan pendidikan dan status mereka. Jadi dengan mendidik tenaga kerja tingkat menengah dan atas yang sangat diperlukan oleh Tanzania, sistem pendidikannya semakin memperlebar jurang pemisah antara sektor modern dan tradisional serta menciptakan suatu kelas elite. Kenyataan ini terungkap secara dramatis kepada Presiden Nyerere pada bulan Oktober 1966, ketika sekelompok sekitar 400 orang mahasiswa yang mengenakan toga akademis berbaris ke Gedung Negara sebagai protes terhadap syarat-syarat Dinas Nasional mereka. Menurut syarat-syarat itu para mahasiswa yang pendidikannya dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah akan mengikuti latihan militer selama 5 bulan dan kemudian bekerja selama 18 bulan dengan 40% gaji biasa. Konfrontasi ini mulai dengan tenang tetapi Nyerere menjadi semakin marah dan dalam kemarahan serta keputusasaan ia antara lain berkata:

"Kita semua, saya dan kalian, termasuk golongan pemerias. Untuk inilah seluruh rakyat telah bekerja? Inilah perjuangan kita dan rakyat negara ini? Untuk mempertahankan suatu tingkat atas pemerias ... Kalian menuntut satu pon daging; setiap orang kecuali kaum miskin menuntut satu pon daging. Negara macam apa kita bangun?"²

Dalam pidatonya yang spontan dan marah ini Presiden Nyerere mengambil dua keputusan: memulangkan para mahasiswa ke rumah masing-masing di pedesaan dan memotong gajinya sendiri dan gaji menteri-menterinya sebanyak 20%. Universitas ditutup selama 5 bulan.

Ditinjau dari peristiwa-peristiwa ini dan dari sikap yang mendasarinya, maka tidak mengherankan bahwa dua pokok Deklarasi Arusha, yang menurut Nyerere merupakan hal-hal yang paling penting, adalah bagian-bagian yang menekankan swadaya dan menentang ketergantungan yang terlalu besar pada bantuan luar negeri, dan bagian-bagian yang memuat suatu *Kode Kepemimpinan* yang dimaksud untuk mengekang praktek-praktek serakah pemimpin-pemimpin pemerintah dan pejabat-pejabat senior. Dengan bahasa yang jelas dan hidup, Deklarasi ini memberikan serangkaian definisi baru mengenai sosialisme Afrika dengan suatu strategi pembangunan nasional yang baru.

1 Cranford Pratt, *op. cit.*, hal. 229

Deklarasi itu diterima baik oleh Komite Eksekutif Nasional TANU pada bulan Februari 1967. Dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan, Tanzania sejauh itu menggunakan senjata yang salah, yaitu "uang". Sasaran Rencana-rencana Pembangunan yang terdahulu ialah lebih banyak pangan, lebih banyak pendidikan, kesehatan yang lebih baik dan sebagainya. Diperkirakan bahwa ini semua akan dapat dicapai dengan banyak uang yang dapat diperoleh dari pajak. Namun jelaslah sekarang bahwa di suatu negara miskin hal itu berarti menuntut kepada pemerintah agar mengadakan suatu mukjizat. Atau uang akan datang dari bantuan luar negeri; tetapi ini adalah suatu sumber yang tidak memadai dan tidak pasti, lagi pula bisa membahayakan kemerdekaan. (Krisis kebijaksanaan luar negeri Nyerere pada pertengahan 1960-an menunjukkan betapa tidak menentunya bantuan-bantuan negara-negara besar seperti Inggris, Jerman Barat dan Amerika Serikat). Atau dana-dana itu bisa dihasilkan lewat pembangunan industri, tetapi pembangunan semacam itu akan membutuhkan lebih banyak uang dan keahlian teknis daripada yang dimiliki Tanzania sendiri. Tidak, pembangunan suatu negara dilakukan oleh orang-orang, bukan uang, dan dasar pembangunan itu adalah keswadayaan.

"Mulai saat ini kita akan berdiri tegak dan berjalan ke depan atas kaki sendiri dan tidak melihat masalahnya secara terbalik. Industri dan uang akan datang tetapi dasarnya adalah rakyat dan kerja keras mereka khususnya di bidang pertanian. Inilah arti swadaya."¹

Sosialisme Afrika gaya Kenya seperti ditafsirkan dalam Sessional Paper No. 10, yang sasaran-sasaran pokoknya sampai sekarang merupakan kebijaksanaan Kenya, menganut pendapat yang berlainan tentang pembangunan. Seperti diutarakan di atas, pemikiran pokok kebijaksanaan perencana Kenya ialah mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Salah satu kekurangan gawat yang dihadapi Kenya ialah modal dalam negeri dan faktor dasar kekurangan ini adalah rendahnya pendapatan per jiwa.

"Pemecahan yang sebenarnya bagi masalah ini ialah menaikkan pendapatan per jiwa, yaitu berkembang. Dilema yang kita hadapi memang mudah dikatakan tetapi lebih sulit diatasi. Untuk berkembang lebih pesat kita harus menabung lebih banyak, tetapi untuk menabung lebih banyak kita harus berkembang lebih cepat... Untuk mengimbangi kurangnya modal dalam negeri, agar dapat lebih cepat berkembang sehingga semua aspirasi kita terwujud, kita harus meminjam dari negara-negara lain atau badan-badan internasional dan merangsang mengalinnya modal swasta dari luar negeri."²

Kedua negara itu telah mengambil sikap yang berbeda dalam soal *nasionalisasi*. Dalam periode perdebatan tentang Deklarasi Arusha, Nyerere mengadakan suatu rapat kabinet Sabtu pagi dan mendapat persetujuan untuk

1 Tanganyika African National Union, *The Arusha Declaration* (Dar es Salam, 1967), hal. 17

sejumlah nasionalisasi. Mulai Senin pagi berikutnya setiap hari ia mengadakan pengumuman dan pada akhir pekan itu bank-bank, rumah-rumah dagang dan perusahaan-perusahaan asuransi milik asing sudah dinasionalisasi. Sebaliknya Sessional Paper No. 10 mengambil sikap yang lebih pragmatis daripada doktriner mengenai nasionalisasi.

"Nasionalisasi akan dipertimbangkan kalau kebutuhannya mendesak, kalau kendali-kendali lain tidak lagi efektif, dan kalau dicapai pengertian bahwa kebanyakan industri yang dinasionalisasi itu tidak akan beroperasi dengan rugi."¹

Contoh lain perbedaan antara kedua negara itu ialah dalam sikap mereka masing-masing terhadap kepentingan-kepentingan bisnis "ekstra-kurikuler" pemimpin-pemimpin pemerintah dan pegawai negeri. Bagian V Deklarasi tersebut menetapkan sejumlah pembatasan bagi anggota-anggota senior TANU, para menteri dan anggota parlemen, dan pegawai negeri eselon atas serta menengah. Mereka ini tidak diperkenankan memiliki saham atau menjabat sebagai direktur perusahaan swasta manapun, tidak boleh menerima lebih dari satu gaji, memiliki sesuatu untuk disewakan atau mempekerjakan orang lain. Sebaliknya di Kenya pemerintah menerima baik rekomendasi Komisi Ndégwa tahun 1971. Sesuai dengan asas-asas biasa tingkah laku pegawai negeri, Komisi tidak berkeberatan bahwa pegawai negeri "memiliki harta pribadi atau terlibat dalam dunia bisnis sampai tingkat di mana kekayaan mereka bertambah secara substansial berkat kegiatan-kegiatan serupa itu".² Komisi juga menyetujui ratio 36 : 1 untuk gaji tertinggi dan gaji terendah pegawai negeri. (Di Tanzania rasionya adalah 9 : 1). Gaji dan pendapatan yang relatif tinggi memungkinkan dan, atas tekanan sosial dan politik, mewajibkan para menteri dan pejabat senior Kenya melibatkan diri dalam atau menyumbang untuk kampanye bagi proyek-proyek swadaya seperti mendirikan sekolah-sekolah menengah dan institut-institut teknologi yang baru. Di Tanzania kegiatan semacam itu akan memancing dakwaan korupsi.

Jadi secara resmi Kenya tidak mempersoalkan perbedaan kekayaan dan status individu. Rencana Pembangunan 1974-1978 mengakhiri suatu bagian tentang pembagian pendapatan sebagai berikut:

"Akhirnya rencana sekarang ini memberi setiap orang kesempatan untuk ikut serta secara aktif dalam ekonomi dan dengan demikian memperbaiki taraf hidupnya. Tetapi perbaikan semacam itu pasti akan dicapai lebih cepat oleh sementara orang daripada oleh orang-orang lain. Oleh sebab itu pemerataan pendapatan bukanlah sasaran pokok rencana ini. Perbedaan ketrampilan, usaha dan prakarsa harus diakui dan diberi imbalan."³

1 *Ibid.*, hal. 27

2 Republic of Kenya, *Report of the Commission of Inquiry (Public Service Structure and Remuneration Commission)* (Nairobi: Government Printer, 1971), hal. 14

3 Republic of Kenya, *Development Plan 1974-1978*, Part I (Nairobi: Government Printer,

PENDIDIKAN DI KENYA: SISTEM FORMAL

Dalam konteks strategi pembangunannya, sistem pendidikan Kenya terus memberikan kesempatan untuk maju lewat suatu sistem ujian yang kompetitif dan menawarkan prospek imbalan untuk jasa dan kerja keras kepada kaum muda. Bersamaan dengan itu Kenya berusaha menyamakan kesempatan bersaing itu, antara propinsi-propinsi dan antara pria dan wanita, maupun memperbesar anggaran belanjanya untuk memperluas kesempatan itu. Hanya sedikit negara, kalau ada, di dunia yang mampu menandingi Kenya yang secara konsisten membelanjakan hampir $\frac{1}{3}$ anggaran belanjanya untuk pendidikan.¹ Perbandingan antara Kenya dan Tanzania selama beberapa tahun terakhir ini dapat dilihat berikut ini.

Tabel 1²

PERBEDAAN PENDUDUK, ANGGARAN PENDIDIKAN DAN JUMLAH SISWA DI KENYA DAN TANZANIA

	Kenya	Tanzania
Perkiraan jumlah penduduk 1975	13,3 juta	15,3 juta
Perkiraan anggaran Kementerian Pendidikan tahun anggaran 1976-1977	1.396 juta (shilling Kenya)	967,8 juta (shilling Tanzania)
Jumlah siswa SD tahun 1975	3,3 juta	2,06 juta
Jumlah siswa SM tahun 1975	225.100	53.257
Jumlah mahasiswa tahun 1975-1976 (Universitas Nairobi dan Dar es Salam)	3.976	1.728

Kalau perkembangan yang fenomenal ini tetap merupakan ciri sistem pendidikan di Kenya yang menonjol, hal itu hampir semata-mata terdapat di sektor formal. Antara Kemerdekaan dan 1975 jumlah siswa SD meningkat tiga kali lipat, dan jumlah siswa SM dan jumlah mahasiswa bahkan meningkat

1 Republic of Kenya, Ministry of Education, *Education Celebrates Uhuru* (Nairobi: Yomo Kenyatta Foundation, 1973), hal. 16

2 Bahan untuk Kenya: Ministry of Finance and Planning, *Economic Survey 1976* (Nairobi: Government Printer); Ministry of Education, *Annual Reports and Newsletters* (Nairobi). Dan untuk Tanzania: E.E. Moshi, *Education for Self-Reliance: Policies, Problems and Implementation* (Institute of Development Studies, University of Sussex, 1977); World Bank, *Educational Reform for Development: A Review of Tanzania Approach* (Dar es Salam, 1976).

6 kali lipat.¹ Laju pertumbuhannya agak menurun pada tahun-tahun terakhir ini, tetapi dalam periode lima tahun (1970-1971 sampai 1975-1976) pengeluaran Kementerian Pendidikan meningkat sampai hampir tiga kali lipat. Salah satu aspek pokok ledakan pendidikan ini ialah program swadaya masyarakat. Pembangunan SD dan SM bersama-sama dengan proyek-proyek kemasyarakatan lainnya dalam periode 1967-1972 melibatkan sumbangan sebanyak 295 juta shilling Kenya, termasuk 124 juta uang tunai.² Walaupun jumlah sekolah negeri meningkat, pada tahun 1975 lebih dari separuh sekolah-sekolah menengah tidak mendapat subsidi (650 dari 1.081).³ Sebagian dari sekolah-sekolah itu dikelola oleh swasta (memiliki sekolah swasta di negara yang sangat mendambakan pendidikan bisa menguntungkan), tetapi mayoritas adalah jenis Harambee. Sebagian besar insentif untuk mendirikan sekolah-sekolah ini adalah harapan bahwa suatu ketika pemerintah akan mengambil alihnya. Harapan ini tidaklah sia-sia. Pada tahun 1973 lebih dari 70% sekolah negeri itu dimulai atas prakarsa Harambee. Pada tahun 1974 pemerintah mengubah kebijaksanaannya dan tidak lagi mengambil alih sekolah-sekolah itu tetapi memberikan kesempatan kepada para lulusannya untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah negeri tingkat Forma III. Lebih lanjut sesuai dengan Program Paket Harambee, yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan 1974-1978, pemerintah setuju untuk setiap tahun memberikan bantuan kepada 50 dari sekolah itu dalam bentuk guru-guru yang berwenang (sejumlah di antaranya guru dari luar negeri), perlengkapan audio visual dan bantuan dari Inspektorat. Kebijakan pemerintah itu bukan saja dimaksud untuk memberikan bantuan finansial kepada sekolah-sekolah itu, melainkan juga untuk meningkatkan mutunya, khususnya kebolehan para siswanya dalam Ujian Sekolah Menengah Pertama Kenya yang diadakan pada akhir Forma II. Pada tahun 1970 hanya 20% dari siswa-siswa sekolah tak bersubsidi itu lulus dalam 5 mata pelajaran dan mendapat ijazah.⁴

Dari proyek-proyek swadaya yang paling ambisius ialah Institut-institut Sains dan Teknologi Harambee. Pada tahun 1974 delapan institut serupa itu terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan mengumpulkan lebih dari 25 juta shilling Kenya. Pada tahun berikutnya 3 institut dibuka, sedangkan lainnya pada berbagai tahap pembangunan. Sejak awal 1970-an ketika muncul gairah untuk mendirikan sekolah-sekolah semacam itu, pengumpulan dana kurang berhasil dan bantuan luar negeri juga tidak berlimpah seperti diharapkan.

1 Republic of Kenya, Ministry of Education, *Newsletter* (Juli-Agustus 1975), hal. 4

2 Perkiraan Kementerian Koperasi dan Kepegawaian tahun 1973 yang dikutip dalam G.C. Mutiso, *Technical Training and Harambee Institute of Technology* (Nairobi, 1976), hal. 47-48

3 Republic of Kenya, Ministry of Education, *Annual Report 1973* (Nairobi: Government Printer), hal. 33

4 Republic of Kenya, Ministry of Education, *A Study of Curriculum in Kenya* (Nairobi: Government Printer), hal. 10

Delapan institut yang telah terdaftar itu kiranya akan dibuka, biarpun masih ada sedikit ketidakpastian, dan akan mendidik tukang-tukang trampil, insinyur-insinyur dan sekretaris-sekretaris. Tetapi ada petunjuk-petunjuk bahwa institut-institut itu menghadapi banyak kesulitan untuk menutup biaya modal dan pengelolaan dan untuk mencari staf. Dan sekiranya kedelapan institut itu berhasil mencapai sasarannya menampung 4.000 mahasiswa, tidak besarlah kemungkinan bahwa semua lulusannya akan mendapat pekerjaan.¹

Dalam periode perkembangan ini Kenya berusaha menyamakan kesempatan di antara propinsi-propinsi, khususnya untuk menyediakan tempat-tempat Forma I bagi lulusan SD. Tetapi sejauh ini berlangsung terus perbedaan antar propinsi yang menyolok, khususnya antara distrik-distrik di propinsi-propinsi dalam proporsi penduduk usia sekolah yang ditampung di SD, dan di tempat-tempat Forma I dalam proporsi dengan jumlah anak yang berusia 14 tahun.

Tabel 2²

PROPORSI PENDUDUK YANG DITAMPUNG DI SEKOLAH-SEKOLAH

Wilayah	Ratio murid-murid SD 1975 disesuaikan dengan jumlah anak yang mengulang dan perkiraan penduduk usia sekolah yang terlalu rendah	Jumlah tempat Forma I 1974 lawan calon CPE	Jumlah tempat Forma I 1975 lawan jumlah anak 14 tahun
Tengah	103%	12%	12%
Pantai	58	19,5	9
Timur	92	11	8,5
Nairobi	87	29,5	22,5
Timur Laut	11	41	3
Nyanza	86	10,5	6,5
Rift Valley	75	13	6
Barat	102	12,5	9

Angka-angka ini menunjukkan secara tepat proporsi besar anak-anak usia sekolah yang ditampung di sekolah-sekolah, sudah barang tentu berkat pengumuman Presiden Kenyatta bulan Desember 1973, bahwa mulai tahun 1974 semua siswa kelas I-IV tak usah membayar uang sekolah. Kolom II melukiskan usaha yang dilakukan untuk menyamakan tempat-tempat Forma I di sekolah-sekolah negeri, serta usaha-usaha yang dilakukan di Propinsi

1 G.C. Mutiso, *op. cit.*, hal. 59

2 *Kenya: The Allocation of State Resources within Education and Training*

Timur Laut untuk mengkompensasikan proporsi anak yang ditampung di SD yang kecil sekali. Sekolah-sekolah Harambee meningkatkan jumlah tempat Forma I hingga 30% dari calon-calon CPE dapat melanjutkan ke sekolah menengah.

Dalam dasawarsa setelah Kemerdekaan jumlah anak perempuan yang ditampung di SD meningkat dari 34% menjadi 45%. Akan tetapi di SM boleh dikata tidak ada perubahan. Baik pada tahun 1963 maupun 1973 hanya $\frac{1}{3}$ murid Forma I-IV dan $\frac{1}{4}$ murid Forma V-VI adalah anak perempuan. Di Universitas Nairobi hanya 15% adalah mahasiswi.¹ Dapat disebutkan beberapa faktor ketimpangan ini. Tradisi lebih menitikberatkan pendidikan anak laki-laki dan orang tua lebih mendorong anak laki-laki mereka untuk meneruskan ke sekolah menengah. Pada tahun 1973 misalnya, anak-anak laki-laki yang mengulang di kelas VII untuk mencoba lagi masuk Forma I adalah dua kali lebih banyak. Kurikulum SD dan SM kurang menyiapkan gadis-gadis untuk peranan wanita dalam pembangunan pedesaan. Dalam sektor upah dan gaji juga masih banyak prasangka yang kuat di antara para majikan terhadap penempatan wanita, khususnya dalam pekerjaan yang menurut tradisi dilakukan oleh pria.

PENDIDIKAN NON FORMAL DI KENYA

Secara kasar program pendidikan nonformal dibedakan menjadi tiga kategori: pertama, program-program tambahan yang dicanangkan bagi mereka yang masih bersekolah; kedua, program lanjutan atau kesempatan kedua untuk lulusan SD atau mereka yang putus sekolah; dan ketiga, program pendidikan nonformal sebagai alternatif sistem formal bagi mereka yang tidak pernah bersekolah (tahun 1974 sekitar 55% penduduk).² Di sini hanya dapat dibahas satu atau dua contoh program-program itu.

Program tambahan ini mencakup "Persatuan Petani Muda" yang dimulai di jaman kolonial untuk anak-anak petani Eropa, tetapi kini diikuti oleh lebih dari 6.000 putera Afrika di sekolah menengah, dan Klub 4K yang berasal dari gerakan 4H di Amerika Serikat, yang biasanya dikaitkan dengan sekolah-sekolah dasar atau pusat-pusat remaja, dan pemimpin-pemimpinnya petugas-petugas extension Kementerian Pertanian. Terdapat sekitar 1.000 kelompok 4K dengan lebih dari 25.000 orang anggota. Salah satu tujuan utamanya ialah menanam bahan makanan di halaman-halaman rumah dan menunjukkan cara-cara bertani modern kepada orang tua mereka.

Suatu program informal untuk anak-anak yang meninggalkan sekolah yang mungkin lebih banyak dikunjungi, dipelajari dan dievaluasi daripada

1 Abigail Krystall, *The Education of Women Since Independence* (Nairobi, 1976). Mimeo.

2 B.E. Kipkorir, *Non Formal Education in Kenya*. Discussion Paper No. 221. Institute of

program lain manapun di Kenya adalah gerakan politeknik desa. Dipikirkan pada pertengahan 1960-an oleh Andrew Hake dan rekan-rekannya pada Dewan Kristen di Kenya sebagai bagian penyelesaian masalah anak-anak yang meninggalkan SD, pusat politeknik desa itu diusulkan sebagai pusat latihan lokal yang murah, masing-masing dengan sekitar 100 muda-mudi. Tekanan diletakkan pada pengajaran ketrampilan-ketrampilan dan teknik-teknik praktis yang secara realistis dikaitkan dengan pencarian nafkah di pedesaan. Para pendiri gerakan ini membayangkan pusat-pusat 125 VP di mana revolusi agraris akan dipercepat dan tenaga anak-anak lulusan SD akan dimobilisasikan selama dua tahun dan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang menguntungkan di tempat-tempat mereka.¹

Pada tahun 1976 pusat-pusat politeknik ini telah berakar kuat dengan 130 proyek yang menerima bantuan pemerintah dan suatu komitmen dalam Rencana Pembangunan 1974-1978 untuk memperluasnya menjadi 250 dan untuk mengeluarkan 1 juta pon Kenya bagi pengembangannya. Sejauh ini pusat-pusat itu tetap beroperasi dengan biaya rendah (1.300-1.800 juta shilling Kenya tahun 1974) dan menyajikan latihan dalam pertukangan lokal seperti pertukangan kayu, pertukangan batu dan pertukangan jahit (kursus yang paling populer) dan banyak macam pelajaran, dari membuat pakaian sampai beternak lebah. Di samping keberhasilan, pusat-pusat politeknik itu juga menghadapi masalah-masalah mereka: mencari dan mempertahankan staf, khususnya manajer-manajer yang cakap; mencari pekerjaan untuk mereka yang lulus di pedesaan; dan membuat berimbang otonomi lokal dan koordinasi oleh instansi pusat. Kendati masalah-masalah itu, mereka berhasil menjadi suatu gerakan yang potensinya besar. Dengan orientasi lokalnya, kurikulum sendiri-sendiri, latihan kerja, minimum fasilitas dan pengajaran dalam bahasa Swahili, mereka dapat dilihat sebagai antitesis sekolah menengah. Bahkan dengan perluasan yang direncanakan sekarang ini, gerakan itu hanya akan menampung kurang dari 5% lulusan SD setiap tahun dan sulit dilihat sebagai suatu alternatif pendidikan menengah formal. Di lain pihak, kalau Kenya memutuskan untuk menganut suatu program pendidikan dasar 9 tahun, pusat-pusat politeknik itu bisa menjadi model dua tahun terakhir. Peranannya sebagai model itu akan bergantung pada soal apakah pusat-pusat itu dapat mempertahankan ciri-cirinya sekarang ini atau akan terpaksa mengalah terhadap tekanan menuju formalisasi.² Kebanyakan pusat politek-

1 *After School What? Report of a Joint Working Party of the Christian Council of Kenya and the Christian Churches Educational Association* (Nairobi, 1966), hal. 64

2 Untuk analisa yang lebih mendalam mengenai pusat politeknik pedesaan lihat dua karangan David Court, "Dilemma of Development: The Village Polytechnic Movement as a Shadow System of Education in Kenya", dalam *Education, Society and Development: New Perspectives from Kenya* (Nairobi: Oxford University Press, 1974), hal. 219-241, dan *Village*

nik ini memberikan kesempatan kepada para siswanya untuk mengikuti ujian kejuruan standar. Dalam kenyataan ujian-ujian semacam itu diberikan atas permintaan siswa. Persiapan untuk ujian-ujian itu berarti pengajaran formal untuk mendapat ijazah dan pada gilirannya kemungkinan mendapat pekerjaan di kota. Semuanya ini bertentangan dengan tujuan didirikannya pusat-pusat politeknik itu.

Sebagai ganti kampanye pendidikan besar-besaran yang terpadu, Kenya membagi pelayanannya untuk orang-orang dewasa di antara beberapa kementerian. Terdapat sekitar 6.000 orang yang dipekerjakan dalam dinas-dinas ekstensi Kementerian Pertanian, sejumlah yang sama pada Kementerian Perumahan dan Dinas Sosial, dan sekitar 1.000 orang pada Kementerian Kesehatan. Pendekatan secara kompartemen ini jelas bermanfaat dengan mendatangkan keahlian di daerah-daerah pedesaan, tetapi kurang berhasil mengkoordinasikan program-program pendidikan dewasa. Tetapi satu usaha koordinasi yang berhasil adalah dalam Program Perbaikan Hidup Keluarga (Programs for Better Family Living/PBFL). Dengan dana dari FAO dan Pemerintah Kenya program-program ini telah melatih pemimpin-pemimpin, mengembangkan bahan dan memulai proyek-proyek keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan, pertanian, ekonomi rumah tangga dan pengembangan masyarakat.¹ Bukan saja program-program itu sendiri terpadu, tetapi perencanaan dan implementasinya adalah hasil kerja sama beberapa kementerian dan sejumlah badan swasta yang bekerja dari tingkat nasional ke tingkat lokal. Sasaran utama PBFL adalah keluarga berencana tetapi melalui suatu pendekatan komprehensif yang mencakup perbaikan kesehatan, peningkatan pendapatan, dan mutu perawatan anak yang lebih tinggi.

Program-program pemberantasan buta huruf tidak pernah mendapat prioritas di Kenya dan tiada petunjuk bahwa akan terjadi suatu perubahan kebijaksanaan yang penting. Target Rencana Pembangunan 1974-1978 memang penampungan 200.000 orang pada tahun 1978, tetapi dengan alokasi dana hanya 59.000 pon Kenya akan mengherankan kalau suatu kampanye yang berhasil dapat dilancarkan dengan bantuan kurang dari 12 shilling Kenya per siswa. Bagian Pendidikan Dewasa Pemerintah beberapa kali dipindahkan dari kementerian yang satu ke yang lain, dan suatu Dewan Pendidikan Dewasa yang berfungsi untuk mengkoordinasi dan memajukan pendidikan dewasa hanya mencapai hasil terbatas. Paling tidak dapat disebutkan dua alasan pengabaian ini. Pertama, Kenya bertekad mengembangkan pendidikan formal atas dasar ideologi pertumbuhan. Perluasan ini terus dilanjutkan melampaui periode kebutuhan akan tenaga kerja dan merupakan jawaban pemerintah

1 Eric R. Krystall, *Adult Education for the Improvement of the Quality of Family and Com-*

atas tuntutan rakyat. Kedua, berbeda dengan Tanzania, Kenya tidak mempunyai filsafat politik atau sosial yang terurai jelas yang dirasanya harus disalurkan ke orang-orang dewasa pedesaan. Tanpa motivasi politik, semangat pemimpin nasional atau pedoman-pedoman partai, permintaan akan pendidikan informal adalah minim.

PENDIDIKAN DI TANZANIA SEJAK 1967

Pendidikan untuk Berdikari muncul sebulan sesudah Deklarasi Arusha dan secara eksplisit mengusulkan suatu kebijaksanaan pendidikan untuk suatu masyarakat sosialis yang didasarkan atas pertanian. Dalam kertas ini Nyerere mengecam sistem pendidikan Tanzania karena menggalakkan sikap ketidaksamaan, arogansi intelektual dan individualisme. Kemudian dia mengidentifikasi keempat unsur pokok yang menciptakan sikap itu.

"Pertama, inti pendidikan yang kita sajikan sekarang ini ialah bahwa pada dasarnya ia adalah suatu pendidikan elitis yang dimaksud untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan suatu proporsi yang sangat kecil dari mereka yang memasuki sistem sekolah ... Sama pentingnya ialah hal yang kedua: kenyataan bahwa pendidikan di Tanzania memisahkan para pesertanya dari masyarakat untuk mana ia diandaikan menyiapkan mereka ... Sekolah selalu terpisah, bukan bagian masyarakat. Ia adalah suatu tempat yang didatangi anak-anak dan diharap oleh orang tua mereka tidak akan memaksa mereka menjadi petani dan hidup terus di desa-desa ... WASPADA

Hal yang ketiga ialah bahwa sistem kita sekarang ini mendorong anak-anak untuk mengira bahwa seluruh pengetahuan yang berguna diperoleh dari buku-buku atau dari 'kaum terpelajar'-artinya mereka yang telah menyelesaikan suatu pendidikan formal ...

Akhirnya, dalam beberapa hal yang paling penting ialah bahwa bangsa kita yang muda dan miskin mengambil sementara pria dan wanita muda yang paling sehat dan paling kuat dari pekerjaan produktif ... Sekarang ini terdapat sekitar 25.000 siswa di sekolah menengah; mereka tidak bekerja sambil belajar, mereka hanya belajar."¹

Bagaimana pemecahannya? Secara singkat hal itu dapat dilukiskan sebagai berikut: suatu pendidikan dasar yang 'lengkap pada dirinya sendiri' dengan tujuh atau delapan tahun sebagai usia masuk sekolah, sehingga mereka yang menyelesaikan kursus tujuh tahun itu dapat segera ikut mengembangkan pedesaan; demikianpun sekolah-sekolah menengah tidak boleh hanya menyiapkan para siswa untuk tahap pendidikan berikutnya tetapi harus mendidik dan melatih mereka untuk hidup dan pengabdian di desa; ujian hendaknya diturunkan dalam penghargaan pemerintah dan masyarakat dan seleksi untuk sekolah menengah dan universitas hendaknya didasarkan bukan saja atas hasil ujian tetapi juga atas penilaian pekerjaan yang telah dilakukan

untuk sekolah dan masyarakat. Kurikulum pendidikan dasar hendaknya diubah dan lebih diarahkan ke pedesaan dan anak-anak SD hendaknya dipadukan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan desa. Sekolah-sekolah menengah hendaknya ikut memikul biaya pengelolaannya dengan mengerjakan suatu usaha tani atau bengkel, tetapi bukan sebagai suatu fasilitas latihan belaka melainkan sebagai suatu bagian integral komunitas sekolah. Sebenarnya setiap sekolah hendaknya juga suatu usaha tani dan komunitas sekolah harus terdiri atas guru dan murid yang juga petani.

Dibandingkan dengan kebijaksanaan pendidikan sebelumnya, *Pendidikan untuk Berdikari* merupakan suatu dokumen revolusioner. Ia menempatkan kebijaksanaan pendidikan sungguh-sungguh dalam konteks suatu masyarakat sosialis baru dan mengemukakan bahwa pendidikan harus menjadi sarana untuk menentukan nilai-nilai, sikap-sikap dan ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan untuk menciptakan bukan saja suatu masyarakat baru tetapi juga manusia Tanzania baru. Nyerere betul-betul yakin akan daya pendidikan untuk membentuk suatu masyarakat tanpa kelas dan orang-orang di dalamnya yang siap untuk bekerja bagi kesejahteraan bersama. Dengan demikian dia menentang tradisi dari jaman kolonial di mana orang tua melihat sekolah sebagai suatu jenis sarana yang berbeda: suatu pelarian dari tanah dan suatu jalan ke kesempatan individual. Usul-usul pokok *Pendidikan untuk Berdikari* sebenarnya tidak baru. Pendidikan yang relevan atau disesuaikan dengan kehidupan pedesaan telah diusulkan puluhan tahun sebelumnya oleh para pengelola sekolah kolonial tetapi ditolak oleh orang-orang Afrika yang tidak mau ditipu dengan suatu jenis pendidikan lokal yang kurang bermutu yang sangat merugikan kemampuan mereka untuk bersaing guna memasuki kehidupan di kota dan pekerjaan-pekerjaannya. Maukah para orang tua Tanzania menerima suatu jenis pendidikan yang sangat berlainan, yaitu jenis pendidikan yang dimaksud untuk menyiapkan kaum muda untuk hidup di desa-desa dan tidak untuk pekerjaan yang mendapat upah, setelah partai dan pemimpin nasional mereka mengusulkannya sebagai soal kebijaksanaan? Dan dapatkah Tanzania di bawah Nyerere menciptakan suatu kader pemimpin yang akan menolak untuk menuntut hal-hal yang menurut tradisi merupakan hak suatu elite?

Lembaran neraca perkembangan pendidikan sejak 1967 dapat dibaca secara bermacam-macam, dan karena kesan-kesan dan angka-angka statistik saling bertentangan, sulit diadakan generalisasi-generalisasi yang pasti kecuali mungkin satu: cita-cita Nyerere belum terwujud. Suatu Lokakarya mengenai Pendidikan yang dihadiri dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa serta pejabat pemerintah tahun 1974 dalam Lapornya sangat mengecam kemajuan yang dicapai ke arah

"Hubungan guru-murid yang otoriter memperkuat sikap pasif para pelajar dan merupakan ciri segala tingkat sistem pendidikan ... Pendidikan dasar kurang baik daripada sebelum kebijaksanaan itu sebagai akibat cara implementasinya. Usaha-usaha tani dan bengkel-bengkel digabungkan dengan sekolah-sekolah (dasar) begitu rupa sehingga latihannya bahkan tidak ada ... Kegiatan swadaya terpisah dari kegiatan sekolah lainnya, sebagian besar pekerjaan yang membosankan, tanpa komponen belajar ... Sistem ujian tetap maha suci."¹

Uang yang masuk dari penjualan produksi sekolah-sekolah tahun-tahun belakangan ini sangat sedikit. Jumlah uang dari kegiatan-kegiatan swadaya di seluruh negara dibandingkan dengan jumlah siswa sekolah termasuk sekolah guru dan jumlah shilling yang dihasilkan per siswa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3²

Jenis Sekolah	Tahun	Jumlah murid seluruh negara	Jumlah uang dari kegiatan swadaya (shs. Tan)	Uang hasil per murid (shs. Tan)
SD	1972	1.003.596	1.504.413	1,5
SM	1970	41.178	255.834	9
SPG	1975	6.692	180.238	27

Telah dilakukan usaha untuk menyamakan kesempatan pendidikan menengah dengan menggunakan sistem kuota regional menurut sistem mana seleksi untuk Forma I dilakukan atas dasar jumlah murid kelas VII di setiap daerah. Pola serupa itu sudah barang tentu menguntungkan daerah-daerah di mana proporsi besar anak-anak di SD, dan pada tahun 1975-1976 proporsi itu berbeda 40-87% antara daerah-daerah.³

Sekolah-sekolah menengah swasta, yang banyak terletak di daerah perkotaan untuk anak-anak pegawai, banyak meningkat dalam periode 1967-1975, dan jumlah siswanya meningkat dari 5.991 menjadi 14.930, yang merupakan 28% jumlah siswa SM seluruh negara. Pemerintah tidak membatasi perkembangan sekolah-sekolah swasta itu, mungkin karena sekolah-sekolah itu berfungsi sebagai katup pengaman dengan menampung anak-anak golongan menengah yang gagal masuk sekolah negeri. Juga diisyaratkan bahwa sekolah-sekolah swasta itu melindungi sistem sekolah negeri terhadap orang-

1 B.L. Mwobahe dan M.J. Mbilinyi, Ed., *Challenge of Education for Self-Reliance in Tanzania* (Dar es Salam: Institute of Education, 1975), hal. 13-14. Mimeo.

2 World Bank, *Educational Reform for Development: A Review of Tanzania Approach* (Dar es Salam, 1976)

3 Swedish International Development Authority (SIDA), *Education and Training in Tanzania*

orang tua yang berpengaruh, yang karena ingin mendapatkan pendidikan menengah bagi anak-anak mereka bisa berusaha merusak sifat tidak memihak sistem seleksi Forma I.¹

Proporsi anak-anak perempuan dalam sistem pendidikan formal hanya sedikit meningkat. Dari 1962 sampai 1973 proporsi anak-anak perempuan di SD meningkat 35-41% tetapi perbaikan itu lebih merupakan hasil berkurangnya anak putus sekolah daripada hasil penampungan lebih banyak anak perempuan di kelas I.² Dalam pendidikan menengah tiada perbaikan dalam periode 1965-1975 dalam proporsi anak-anak perempuan yang masuk Forma I sekolah-sekolah negeri (27%), dan yang ditampung dalam Forma VI (14%).³ Dan pada tahun 1975-1976 hanya 10% mahasiswa Universitas Dar es Salam adalah wanita.⁴

Pada tahun 1970 Proyek MTUU (Mpango/Tanzania/Unicef/Unesco) mulai dengan tujuan untuk menatar guru-guru SD dan mengarahkan mereka pada tujuan-tujuan pendidikan berdikari. Mula-mula dipilih 30 guru keliling dan mereka ini, dengan bantuan staf institut keguruan, mengorganisasi kursus untuk sekitar 2.400 guru setiap tahun. Kebutuhan akan buku-buku pegangan baru merupakan suatu masalah sejak 1967 ketika bahasa Swahili menjadi bahasa pengantar di SD. Pada tahun 1971 suatu peraturan Kementerian Pendidikan menetapkan sebagai bahasa pengantar dalam Forma I dan II sekolah-sekolah menengah. Keputusan ini hanya secara berangsur-angsur dilaksanakan dan dalam sementara mata pelajaran (sejarah, ilmu bumi dan pendidikan politik) lebih cepat daripada dalam lain-lain mata pelajaran. Guna memenuhi kebutuhan akan buku-buku pelajaran dan lain-lain buku SD yang baru, diadakan perundingan-perundingan dengan Unicef dan sebagai hasilnya Printpak Tanzania Ltd. diperlengkapi dengan percetakan yang mampu mencetak 6 juta buku setahun.

Suatu tekanan penting MTUU adalah pada suatu proyek perintis pengembangan kurikulum yang didasarkan atas 35 sekolah komunitas. Sekolah-sekolah model ini mengajarkan Swahili, Inggeris dan matematika, menggunakan buku-buku pelajaran yang disahkan untuk seluruh negara, dan pada akhir kelas VII para siswanya menempuh ujian untuk mendapat ijazah dan bersaing untuk mendapatkan tempat di suatu SM. Tetapi mata pelajaran-mata pelajaran tradisional hanya merupakan sebagian kurikulum. Kewarganegaraan diajarkan di kelas-kelas atas dan mencakup sejarah, struktur dan fungsi

1 Cranford Pratt, *op. cit.*, hal. 224

2 SIDA, *op. cit.*, hal. 27

3 World Bank, *op. cit.*, Tabel B4

4 Basic Education Resource Centre for Eastern Africa, *Teacher Education for Basic Education*

TANU, filsafat sosialis Tanzania, dan "pembentukan sikap-sikap yang diinginkan dan pengambilan nilai-nilai yang berharga". Anak-anak ditugaskan merawat sekolah dan kebunnya (shamba) dan mendapat pelajaran dalam cara-cara bertani, teknik-teknik membangun, dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan setempat.¹ Semuanya ini kelihatan terlalu membebani SD, tetapi dalam mengusulkan jadwal untuk SD Pusat Pendidikan Komunitas ini Kementerian Pendidikan Nasional mengurangi jumlah jam pelajaran per minggu di kelas-kelas atas SD dari 40 menjadi 27, rupanya untuk memberi anak-anak lebih banyak waktu untuk kegiatan luar sekolah. Dan juga ada soal yang mengganggu apakah sekolah itu efektif untuk mengubah sikap-sikap sosial dan politik yang lama dan menciptakan yang baru.

Bukan saja tahun 1967 adalah tahun Deklarasi Arusha dan *Pendidikan untuk Berdikari*, melainkan juga tahun publikasi *Sosialisme dan Pembangunan Pedesaan Nyerere* di mana dia sekali lagi menyatakan keyakinannya bahwa Tanzania pedesaan bisa maju ke arah pembangunan sosialis hanya kalau petani-petani pindah dari milik-milik yang tersebar ke desa-desa sosialis, *viji-vi vya ujamaa*.

"Kita akan mencapai tujuan-tujuan yang kita tetapkan di negara ini kalau dasar kehidupan Tanzania terdiri atas komunitas-komunitas ekonomi dan sosial pedesaan di mana orang-orang hidup bersama dan bekerja sama untuk kesejahteraan semua, dan yang terjalin satu sama lain sehingga semua komunitas yang bermacam-macam itu juga bekerja sama untuk kesejahteraan umum bangsa sebagai keseluruhan."²

Gerakan pedesaan (villagisation) kiranya telah menjadi kebijaksanaan tunggal pemerintah dan TANU yang paling penting sejak 1967. Pada tahun 1969 dikeluarkan suatu surat edaran Presiden yang mendesak para petani untuk pindah ke desa-desa, dan pada tahun 1973 Nyerere mengumumkan bahwa TANU telah memutuskan bahwa semua petani sudah harus hidup di desa-desa pada tahun 1976. Maka terjadilah perpindahan penduduk secara besar-besaran, ada kalanya sebagai akibat paksaan dengan kekerasan dan gerakan yang dipaksakan, sedangkan pada lain-lain kasus prosesnya dicapai lewat pendidikan dan persuasi. Mengenai kampanye ini Colin Legum memberikan komentar berikut: "Di sementara distrik pemilihan dan persiapan lokasi, transpor dan bantuan peralihan ke desa-desa baru, dan diskusi serta penerangan sebelum perpindahan dilakukan dengan baik dan transisi berjalan lancar. Dalam lain-lain kasus, hal-hal yang diperlukan itu tidak ditangani

1 *Education and the Development of Rural Areas: The Community School* (Dar es Salam: Unicef, tanpa tanggal). Mimeo.

2 Julius Nyerere, *Socialism and Rural Development* (Dar es Salam: Government Printer,

dengan baik dan seruan Presiden Nyerere serta partai dibaca - hampir pasti dibaca secara salah - sebagai suatu perintah untuk menyelesaikan pedesaan itu dua tahun lebih awal dengan biaya apapun dan dengan sarana manapun."¹ Bulan Juli 1976 Pemerintah Tanzania mengumumkan bahwa lebih dari 13 juta orang atau sekitar 85% penduduk hidup di desa-desa. Ini sebagian besar adalah "desa-desa pembangunan" yang memenuhi syarat-syarat untuk didaftar dengan memenuhi tuntutan-tuntutan seperti ukuran minimum (250 keluarga), lokasi yang disahkan, dan adanya suatu dewan desa dengan anggota-anggota dewasa. Para warga desa dapat memutuskan untuk bertani secara perorangan atau secara kolektif. Suatu desa *ujamaa* di lain pihak, mempunyai suatu tanah komunal yang luas maupun *shamba-shamba* keluarga yang kecil, suatu koperasi, suplai air, apotik, dinas-dinas pertanian dan kesehatan hewan, dan suatu sekolah yang digunakan untuk pendidikan anak-anak maupun orang-orang dewasa. Dari 13 juta petani yang tinggal di desa-desa sekitar satu juta hidup dalam keadaan *ujamaa*, yaitu dalam desa-desa *ujamaa* yang lengkap, atau dalam bagian-bagian komunal desa-desa yang terdaftar.²

Dipercepatnya pedesaan memerlukan suatu keputusan baru untuk memulai Pendidikan Dasar Universal (UPE). Rencana Pembangunan 1969-1974 mengumumkan bahwa lewat peningkatan jumlah sekolah secara berangsur-angsur UPE akan dicapai pada tahun 1989. Tetapi dengan perpindahan keluarga-keluarga pedesaan ke desa-desa, TANU menyadari bahwa tidak mungkinlah terus memilih 50-60% anak-anak usia sekolah untuk diterima di SD. Bagaimana mungkin dalam batas-batas desa memutuskan bahwa anak yang satu harus masuk sekolah dan anak yang lain tidak? Lagi pula, salah satu insentif yang digunakan dalam kampanye pedesaan adalah janji pelayanan-pelayanan tertentu, termasuk pendidikan. Pada pertemuannya di Musoma bulan Nopember 1974, Komite Eksekutif Nasional TANU memutuskan bahwa UPE akan dimulai bulan Nopember 1977. Ini berarti bahwa semua anak antara 7 dan 12 tahun wajib masuk SD.

Resolusi Musoma itu adalah suatu keputusan yang menarik. Rencana Lima Tahun 1964-1969 membatasi penampungan anak-anak di SD di bawah 50% kelompok usia dan pembatasan itu dipertahankan. Dalam merancang Rencana Lima Tahun yang kedua 1969-1974 pemerintah telah membahas tidak kurang dari 13 rencana pengembangan sekolah dasar yang berbeda-beda sebelum menetapkan tahun 1989 sebagai tanggal untuk memulai UPE. Mempercepat tanggalnya 12 tahun biarpun terdapat banyak masalah

1 Dikutip oleh Roger Carter, *Recent Developments in Village Organization* (Maret 1977). Laporan Seminar Britain-Tanzania Society.

2 Pada tahun 1973 sekitar 750.000 orang dewasa tinggal di desa-desa Ujamaa: *Bulletin*

sehubungan dengan suplai guru, gedung sekolah, buku, perlengkapan dan biayanya mengungkapkan luasnya tekanan para orang tua yang telah pindah ke desa-desa atas TANU. Resolusi itu juga merupakan suatu contoh pembuatan kebijaksanaan yang menarik di Tanzania. Seperti dikatakan oleh Nyerere: "Kita harus lari sedangkan lain-lain orang berjalan," dan sering kali kebijaksanaan ditetapkan dahulu dan baru kemudian dibahas kesulitan-kesulitan implementasinya. Keputusan-keputusan bisa diambil tanpa diketahui sepenuhnya akibat-akibatnya dan pegawai negeri bekerja dalam suasana di mana harapan-harapan sering lebih besar daripada kemampuan aparatur pemerintah untuk memenuhinya.

Resolusi Musoma itu juga mengungkapkan bahwa Komite Eksekutif Nasional TANU sekali lagi mengambil alih fungsi pemerintah mengambil kebijaksanaan. Nyerere mengajukan Deklarasi Arusha, Rencana Lima Tahun II dan usul untuk memajukan pendesaan kepada Komite Eksekutif Nasional sebelum mengajukannya kepada Kabinet atau Parlemen. Rashide Kawawa, seorang anggota Partai yang berkuasa dan seorang anggota Kabinet berkata dalam Parlemen pada tahun 1966: "TANU lebih tinggi daripada pemerintah dan pemerintah hanyalah alat rakyat untuk administrasi."¹ Pada 5 Pebruari 1977 TANU dan Partai Afro Shirazi dari Zanzibar bergabung menjadi Partai Revolusi (Chama Cha Mapinduzi/CCM). Baik konstitusi CCM maupun konstitusi Republik mengungkapkan supremasi partai atas pemerintah. Dengan demikian Komite Eksekutif Nasional (NEC) tidak membuat preseden ketika di Musoma dia bukan saja mengambil keputusan UPE tetapi juga suatu keputusan jangkauan jauh mengenai penerimaan pada universitas. Tidak lagi mungkin masuk universitas berdasarkan ujian Forma VI. Untuk seterusnya para mahasiswa harus bekerja dua tahun dan baru kemudian diterima di universitas atas dasar kualifikasi akademis, sebuah laporan majikan yang memuaskan, dan suatu rekomendasi dari pejabat-pejabat TANU. NEC percaya bahwa peraturan ini tidak akan mempengaruhi penampungan mahasiswa di universitas, tetapi pada 1976-1977 (tahun kedua kebijaksanaan baru) sekitar 30% mahasiswa tingkat satu diterima secara langsung karena kalau tidak tempat-tempat di universitas tidak akan diisi.² Mahasiswi-mahasiswi dan mahasiswa-mahasiswa fakultas teknik termasuk mereka yang boleh masuk secara langsung.

Implementasi UPE ini memerlukan suatu usaha nasional yang besar. Pejabat-pejabat Kementerian Pendidikan Nasional dihadapkan dengan prospek meningkatnya jumlah mereka yang masuk Kelas I sampai 100% antara 1974 dan 1977 dan kebutuhan untuk mendidik 40.000 guru tambahan.

1 Dikutip oleh Pratt, *op. cit.*, hal. 214

(Resolusi-resolusi TANU dan pengumuman-pengumuman hari ulang tahun Presiden Kenyatta merupakan mimpi buruk bagi para perencana.) Segera menjadi jelas bahwa pemerintah tidak mampu memikul biaya pembangunan sekolah-sekolah dan bahwa akan diperlukan suatu program swadaya di tingkat desa. Sejak kemerdekaan pendidikan menghabiskan sekitar 20% anggaran belanja tahunan pemerintah. Undang-undang Desentralisasi tahun 1972 memberikan tanggung jawab eksekutif penuh untuk mengelola sekolah-sekolah dasar kepada Dewan-dewan Distrik, yang bertindak di bawah pengawasan daerah-daerah. Dengan demikian adalah tugas distrik masing-masing dan Dewan-dewan Desa merencanakan implementasi UPE dalam rangka kebijaksanaan-kebijaksanaan luas yang ditetapkan oleh Kementerian. Akan tetapi adalah tugas Kementerian untuk mencetak guru-guru dan dengan maksud itu dirancang suatu jenis pendidikan baru.

Jelas tidaklah mungkin mendidik 40.000 guru SD dalam tiga tahun di 31 sekolah guru. Alternatifnya ialah sistem magang yang disusun dengan seksama yang secara kasar bisa disebut Pendekatan Pendidikan Jarak Jauh. Para magang adalah lulusan SD yang dipilih dengan beberapa tahun pengalaman kerja. Mereka langsung pergi ke SD, biasanya di daerah mereka sendiri, dan di bawah bimbingan 2.400 pendidik guru keliling (ITE) dimulai periode pendidikan tiga tahun. Pada tahun pertama guru magang mengajar 10 sampai 15 jam pelajaran seminggu di bawah pengawasan, bertemu dengan ITE-nya sendirian dan dalam kelompok kecil, dan pada jam-jam sisa minggu kerja mengikuti kursus tertulis yang mencakup ilmu pendidikan dan lain-lain mata pelajaran umum yang dimaksud untuk memperbaiki pendidikan umumnya. Pada tahun kedua dan ketiga guru magang mengajar penuh dan mengikuti kursus-kursus dalam dinas. Dengan banyak bantuan dari Otoritas Pembangunan Internasional Swedia, Institut Pendidikan Dewasa dan sekolah-sekolah guru menulis kursus tertulis dan mengadakan seminar-seminar yang beberapa minggu lamanya untuk para ITE dan guru magang. Kementerian telah siap untuk mengevaluasi rencana ini secara ketat dan dengan maksud itu mendapatkan bantuan ekstern untuk melatih tim-tim Tanzania yang kecil dalam teknik evaluasi pendidikan. Selain itu para ITE dan 70 tutor sekolah guru akan menerima pelajaran evaluasi dalam kursus singkat. Kalau proyeknya dinilai berhasil, ia bisa menggantikan pendidikan guru di lembaga-lembaga tradisional. Dalam keadaan itu sekolah-sekolah guru hanya akan digunakan sebagai pusat-pusat pendidikan guru dalam dinas dan pengembangan kurikulum. Proyeknya juga bisa menjadi model bagi lain-lain negara Dunia Ketiga karena biaya tahunan per siswa diperkirakan 3.000 shilling Tanzania, sedangkan biaya pendidikan guru di sekolah-sekolah guru adalah lima kali lebih besar.

Suatu program eksperimen lain yang kurang mendesak ialah pengembang-

jikan latihan pertukangan kepada para lulusan SD, dan dalam banyak hal mirip dengan pusat-pusat politeknik di desa-desa Kenya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan lokal dengan biaya ringan. Demikianpun sedang pada tahap persiapan Sekolah-sekolah Pembangunan Rakyat, yang dalam banyak segi mirip dengan sekolah-sekolah menengah rakyat Skandinavia. Ini memberikan kursus-kursus satu tahun maupun lebih singkat dengan asrama kepada orang-orang dewasa yang disponsori oleh desa-desa mereka dan dilihat sebagai calon-calon pemimpin. Kurikulumnya menggabungkan pendidikan politik dan umum dengan latihan kebudayaan dan pertukangan. Stafnya biasanya akan terdiri atas 8 atau 9 instruktur, dan telah dimulai suatu program latihan staf.

Pendidikan menengah tidak lagi memegang prioritas seperti dalam periode menyusul kemerdekaan ketika pada tahun 1962 37% siswa Kelas VII diterima pada Forma I. Pada tahun 1975 proporsinya turun menjadi 6% dan diperkirakan akan menurun lagi menjadi 5%. Sangat meningkatnya murid SD berkat UPE sudah barang tentu akan meningkatkan jumlah calon. Pendidikan menengah telah menjadi beranekaragam, dan setiap sekolah paling tidak mempunyai satu mata pelajaran praktis istimewa (ilmu teknik, pertanian, dagang dan domestik). Diperkirakan bahwa di hari depan kebanyakan sekolah akan mengajarkan satu atau dua mata pelajaran praktis. Kendati jumlah kegiatan produktif yang terbatas dalam usaha-usaha tani dan bengkel sekolah, tujuan pemerintah di hari depan ialah bahwa sekolah-sekolah menengah akan menutup 20 biaya pengelolaannya dengan proyek-proyek serupa itu. Dalam hubungan ini pantas dicatat bahwa dalam periode 1970-1975 jumlah siswa sekolah menengah dan jumlah mahasiswa Tanzania di Universitas Dar es Salam hanya meningkat 30% lawan peningkatan masing-masing 60 dan 150% untuk Kenya.

Dan akhirnya dalam tinjauan mengenai perkembangan pendidikan menyusul Deklarasi Arusha, dapat disebutkan kampanye-kampanye pendidikan dewasa yang dapat dibandingkan dengan hal-hal serupa di RRC dan Kuba luas dan hasil-hasilnya. Kampanye-kampanye nasional ini adalah dua macam: kampanye-kampanye yang dibangun sekitar suatu tema pembangunan seperti Manusia adalah Kesehatan (Mtu ni Afya), dan kampanye membaca dan menulis tahun 1971-1975 yang pada tahun terakhir menampung lebih dari 5 juta orang Tanzania.¹ Apabila suatu masyarakat memutuskan hubungan dengan masa lampau dan menganut suatu ideologi sosialisme ujamaa, pendidikan dewasa menjadi satu bagian esensial strategi pembangunan. Sudah sejak 1964 ditegaskan pentingnya pendidikan dewasa.

1. B.P. Mbejile, *The National Literacy Campaign in Tanzania* (Mwanza: Literacy Project

"Maksud pengeluaran pemerintah pada tahun-tahun mendatang ialah melengkapi orang-orang Tanzania dengan ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai pembangunan negara ini. Pertama kita harus mendidik orang-orang dewasa. Anak-anak kita tidak akan mempunyai dampak atas perkembangan ekonomi kita untuk 5, 10 atau bahkan 20 tahun. Sebaliknya sikap orang-orang dewasa mempunyai dampak sekarang juga. Rakyat harus memahami Rencana-rencana untuk pembangunan negara. Mereka harus dapat ambil bagian dalam perubahan-perubahan yang perlu. Hanya kalau mereka bersedia dan mampu melakukannya Rencana akan berhasil ... dan pendidikan dewasa adalah bagian persiapan untuk pekerjaan yang harus kita lakukan."¹

Perlunya pendidikan dewasa memberikan dorongannya, tetapi beberapa faktor lain dalam kombinasi memungkinkan keberhasilan kampanye. Seluruh kekuasaan dan pengaruh Nyerere dan TANU masih mendukungnya sepenuhnya. Komite Nasional Partai menyatakan tahun 1970 Tahun Pendidikan Dewasa dan dalam siaran radionya kepada bangsa yang mengumumkan keputusannya itu Nyerere mengatakan "bahwa arti penting pendidikan dewasa untuk negara kita maupun setiap orang tidak dapat terlalu ditekankan". Pada bulan September 1971, dalam laporannya kepada Konperensi Dua Tahunan Nyerere menyebutkan hal yang sama dan menantang bangsa untuk menangani pendidikan dewasa secara lebih serius. TANU menerima baik tantangan itu dan Konperensi memutuskan bahwa harus dibuat rencana-rencana untuk memberantas buta huruf sama sekali pada tahun 1975.

Suatu faktor kedua ialah penggunaan proyek-proyek perintis yang relatif kecil dan evaluasinya dalam pembangunan menuju kampanye-kampanye nasional yang besar. Institut Pendidikan Dewasa mengorganisasi 250 kelompok pendengar radio pada tahun 1969 untuk mempelajari Rencana Lima Tahun II dan suatu jumlah yang sedikit lebih besar tahun berikutnya untuk membahas tanggung jawab warga negara sebagai pemberi suara. Pengalaman yang diperoleh dalam proyek-proyek ini memungkinkan Institut melancarkan kampanye nasional pertamanya *Waktu untuk Bergembira (Wakate wa Faraha)*, suatu perayaan hasil-hasil sepuluh tahun merdeka dan suatu analisa kekurangan-kekurangannya. Hampir 20.000 orang dalam 1.600 kelompok studi ambil bagian dan Institut menangani masalah-masalah melatih pemimpin-pemimpin kelompok, menyiapkan dan mencetak teks untuk para mahasiswa dan petunjuk-petunjuk studi untuk para pemimpin, dan membagi-bagikannya di seluruh negara. Ini adalah proyek pertama yang disusul dengan suatu evaluasi sistematis.

Kampanye "Manusia adalah Kesehatan" menyusul pada tahun 1973, ketika secara ironis meningkatnya jumlah orang yang hidup di desa-desa

¹ United Republic of Tanzania, *Five Year Development Plan 1964-1969* (Dar es Salaam: Govern-

menimbulkan masalah-masalah kesehatan masyarakat baru. Kampanye ini menekankan pencegahan dan menangani kelima sebab penyakit yang paling umum: malaria, bilharsia, cacing tambang, tuberkulosis dan disentri. Suatu ciri kampanye yang baru dengan sejuta peserta dewasa yang bertemu dalam 75.000 kelompok ini adalah tekanan atas aksi menyusul diskusi. Di daerah Dodoma dengan dorongan TANU hampir setiap keluarga menggali sebuah jamban. Sekali lagi kampanye ini dievaluasi, kali ini secara yang lebih luas dan menyeluruh. Kampanye pembangunan yang ketiga, Pangan adalah Hidup (Chakula ni Uhai) muncul tahun 1974-1975, ketika Tanzania sangat menderita akibat musim kemarau yang parah. Tekanan di sini juga diletakkan pada belajar maupun bertindak dan kelompok-kelompok studi diubah menjadi kelompok-kelompok kerja untuk meningkatkan produksi pangan. Seluruhnya lebih dari tiga juta penduduk pedesaan Tanzania ikut serta dalam kampanye ini yang mengaitkan produksi pangan dengan gizi yang bermutu.¹

Indikasi luasnya gerakan pendidikan dewasa pedesaan ini terletak dalam kenyataan bahwa kampanye membaca menulis tumpang tindih dengan kampanye-kampanye pembangunan yang besar. Dan ini juga mengambil keuntungan dari pengalaman dalam proyek-proyek yang lebih kecil, satu di keempat daerah sekitar Danau Victoria di bawah naungan Unesco dan UNDP, dan satu lainnya yang dimulai oleh Nyerere dengan maksud untuk memberantas buta huruf di enam distrik di berbagai daerah negara dalam tahun kalender 1971. Kampanye nasional mulai tahun yang sama dan berlangsung terus sampai 1975 ketika lebih dari tiga juta orang (77% dari yang terdaftar) ikut ujian membaca menulis pada 12 Agustus 1975. Sekalipun sasaran TANU (semua orang dapat membaca dan menulis) tidak dicapai, 60% penduduk Tanzania di atas 10 tahun kini dapat membaca dan menulis. Seluruh biaya program ini adalah lebih dari US\$ 20 juta, yang lebih dari separuhnya dipikul oleh sebelas donor luar negeri. Biaya per peserta diperkirakan US\$ 3.

Kampanye-kampanye semacam ini menuntut kepemimpinan dan keahlian organisasi Institut Pendidikan Dewasa dan kerja sama aktif beberapa lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Bagian Pendidikan Politik TANU, dan Bagian Pembangunan Pedesaan Kantor PM. Kemampuan Tanzania untuk mengkoordinasi proyek-proyek pendidikan dewasa secara besar-besaran mungkin unik di Dunia Ketiga.

1 Roger Carter, "Educational Campaigns in Tanzania by Radio and Study Group", dalam *Bulletin Britain-Tanzania Society*, Januari 1977. Lihat juga Budd Hall, *Development Campaigns in Rural Tanzania* (Institute of Development Studies, University of Sussex,

DILEMA-DILEMA DAN HAMBATAN

Di antara masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan yang kini dihadapi oleh Kenya dan Tanzania sebagian bersifat umum di kedua negara itu dan lain-lain adalah unik. Dalam dasawarsa yang lampau negara-negara ini menghadapi bencana-bencana kekeringan dan banjir, fluktuasi besar harga-harga ekspor, inflasi, dan kekurangan valuta asing. Permusuhan-permusuhan yang menyebabkan buyarnya Komunitas Afrika Timur (East African Community) melenyapkan keuntungan-keuntungan federasi. Kini sudah tidak ada mata uang bersama, perusahaan penerbangan tunggal, pengelolaan gabungan kereta api dan pelabuhan-pelabuhan, dan suatu universitas federasi. Sebelumnya semangat kemerdekaan mungkin mempunyai suatu akibat pemersatu, tetapi kini adalah api nasionalisme yang lebih berkobar. Untuk hanya menyebutkan satu contoh pemborosan yang mahal: Universitas Dar es Salam dan Universitas Nairobi kini masing-masing membiayai jumlah fakultas yang lengkap.

Dari pengambilan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi, politik dan pendidikan yang berbeda-beda telah muncul masalah-masalah yang unik. Perkembangan sektor pendidikan formal di Kenya menimbulkan banyak keresahan. Sebagai akibatnya pada tahun 1975 diangkat Komite Nasional untuk Sasaran-sasaran dan Kebijakan Pendidikan. Lembaga yang beranggotakan warga negara-warga negara yang terkemuka ini diminta mengevaluasi sistem pendidikan dan merumuskan seperangkat tujuan pendidikan yang baru untuk dasawarsa kemerdekaan yang kedua. Di antara bahan-bahan acuannya adalah penugasan ini: "meneliti hubungan antara struktur dan isi sistem pendidikan formal dan laju serta pola pertumbuhan ekonomi." Dari data-data yang disampaikan kepada Komite ini jelas terbaca suatu keprihatinan mengenai pengangguran. Bekas ahli ekonomi utama Kementerian Perburuhan memperkirakan bahwa lebih dari 150.000, yaitu lebih dari 80% lulusan SD dan SM, tidak berhasil mendapat pekerjaan di sektor formal ekonomi pada tahun 1975; dan kalau trend-trend penampungan di sekolah-sekolah itu berlangsung terus, 10 tahun lagi hanya sekitar 1 dari 10 lulusan sekolah kiranya akan mendapat pekerjaan formal yang digaji.¹ Begitu banyaknya lulusan sekolah yang mengejar suatu jumlah pekerjaan yang relatif kecil mendorong para majikan untuk menuntut kualifikasi-kualifikasi pendidikan yang terlalu tinggi. Pada gilirannya hal itu menciptakan lebih banyak tekanan sosial dan politik akan persekolahan, dan pengeluaran pemerintah diarahkan ke pendidikan dan secara demikian dialihkan dari proyek-proyek penciptaan lapangan kerja di pedesaan. Dengan demikian situasi pengangguran menjadi lebih parah, dan para lulusan sekolah terperangkap dalam suatu lingkaran

frustrasi. Terdapat cukup bukti bahwa siswa-siswa yang lulus dari pusat-pusat politeknik desa dan sekolah-sekolah teknik tidak mendapat pekerjaan.¹ Dan para sarjana juga tidak seuntung mereka yang lulus dari universitas dalam dasawarsa pertama sesudah kemerdekaan dan mudah memasuki sektor pemerintah maupun swasta.

Juga ada keprihatinan mengenai jenis pendidikan yang disajikan tahun-tahun belakangan ini. Rencana Pembangunan Lima Tahun III, setelah menyebutkan kemajuan-kemajuan pendidikan dalam dasawarsa yang lampau, lebih lanjut menyatakan keragu-raguan:

"Tetapi sistem pendidikan itu juga mengembangkan ciri-ciri tertentu yang paling baik dipahami dengan memperhatikan dua faktor utama. Faktor yang pertama ialah bahwa sistem pendidikan formal oleh kebanyakan dilihat sebagai jalan yang paling mudah menuju kemajuan sosial dan ekonomi individual. Dalam periode sesudah kemerdekaan, kebanyakan keuntungan pertumbuhan ekonomi Kenya yang cepat biasanya terpusat di sektor formal ekonomi yang modern. Kesempatan untuk memasuki sektor ini adalah paling mudah bagi mereka yang lulus dari tingkat menengah atau atas sistem pendidikan formal. Faktor yang kedua ialah struktur dan isi sistem pendidikan formal itu memperkuat pola ini. Sistem sekarang ini bersifat sangat selektif. Sasarannya ialah menghasilkan sedikit orang yang siap untuk ditempatkan di sektor formal ekonomi yang modern. Sifat sangat selektif dan orientasi eksklusifnya ke sektor perkotaan itu pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya yang dijunjung tinggi oleh Pemerintah."²

Mengakui bahwa Kenya telah memusatkan pertumbuhannya di sektor modern, bahwa sistem pendidikannya telah mengukuhkan pola pertumbuhan ini, dan dalam alinea yang sama menyatakan bahwa hakikat dan orientasi sistem pendidikan bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh pemerintah adalah suatu pengakuan yang mengherankan. Mengherankan karena pemerintah-pemerintah jarang mengakui kesalahan-kesalahannya dan sama menakjubkan karena adalah kebijaksanaan pemerintah yang membina jenis pendidikan yang kini dikecam itu.

Di Kenya sekarang ini meningkat kekecewaan dengan kepercayaan sebelumnya bahwa pendidikan formal adalah pelopor pembangunan dan bahwa suatu masyarakat dan ekonominya bisa diubah lewat pendidikan. Diserukan lagi tekanan yang lebih besar atas pembangunan pedesaan dan dianjurkan agar pemerintah memberikan prioritas yang lebih tinggi dan bagian sumber dayanya yang lebih besar untuk menciptakan kesempatan-kesempatan kerja yang produktif di pedesaan. Dengan mengalihkan dana-dana dari sekolah-sekolah ke -katakan- proyek-proyek irigasi, rencana-rencana pemukiman, jalan-jalan dan pelayanan-pelayanan ekstensi, yang se-

1 P. Mbithi, *Education, Employment and Unemployment* (Nairobi, 1976)

muanya dimaksud untuk menciptakan kesempatan-kesempatan kerja baru dan meningkatkan pendapatan usaha tani dikemukakan bahwa beberapa segi masalah pengangguran dapat dipecahkan dan pembangunan kemudian akan memimpin pendidikan dan bukan sebaliknya.

Tetapi maukah Kenya, yang kini dilaporkan membelanjakan proporsi anggarannya yang lebih besar untuk pendidikan daripada negara manapun di dunia,¹ mengalihkan sebagian besar sumber-sumber dayanya dari pendidikan ke perluasan kesempatan kerja? Kiranya mau, sebagai suatu keharusan, karena kalau trend-trend pengeluaran baru-baru ini berlangsung terus, maka pada 1990 lebih dari 80% anggaran negara tahunan akan dibelanjakan untuk pendidikan. Tetapi perubahan-perubahan yang besar atau mendasar dalam hakikat sistem pendidikan kemungkinannya tidak sebesar pembaharuan struktural dan kualitatif. Terus berlangsungnya kemajuan ke arah pendidikan dasar yang universal dan akhirnya suatu siklus 9 tahun pendidikan dasar; perbaikan mutu guru SD dan penurunan jumlah guru yang tidak berwenang; pembaharuan ujian CPE dan bahkan akhirnya penghapusannya; suatu perluasan kesempatan pendidikan dewasa dan suatu sistem koordinasi yang lebih memuaskan semuanya itu merupakan rekomendasi-rekomendasi dan usul-usul yang sedang dipertimbangkan.

Sementara itu, karena Kenya telah menjadi suatu masyarakat banyak lapisan dengan perbedaan-perbedaan pendapatan yang besar antara kota dan pedesaan dan antara kaya dan miskin di kota-kota, dan kesempatan menjadi sinonim persamaan, maka dapat diramalkan bahwa orang-orang Afrika yang miskin, untuk menjadi makmur, akan menginginkan kesempatan pendidikan yang sama, dan bahkan jenis sama pendidikan yang telah dinikmati orang-orang kaya Afrika. Dan itu adalah suatu pendidikan formal di sekolah-sekolah yang tersedia lewat seleksi ujian. Karena tidak mempunyai suatu ideologi partai dan pemerintah yang eksplisit, Kenya telah menerima suatu etika individualis, membiarkan munculnya suatu struktur kelas, dan mengambil alih unsur-unsur hakiki kapitalisme Barat.

Di Tanzania orang yang paling keras mengecam adanya jurang antara aspirasi dan kenyataan, antara kebijaksanaan dan hasil, adalah Presiden Nyerere itu sendiri. Bulan Maret 1974, ketika mengunjungi Cina, ia berbicara tentang masalah usaha membangun sosialisme tanpa orang-orang sosialis. "Kita mengalami bahwa dalam pembangunan sosialisme kita harus mengatasi suatu kombinasi kemiskinan nasional dan suatu kepercayaan yang berakar bahwa seorang dapat menyingkirkan beban dari diri dan anak-anaknya

1. Lawrence Lockhart, *A Nine-Year Basic Education System: Would It Solve the Unemployment*

dengan mencari kekayaan pribadi. Dan dia bertindak sesuai dengan itu."¹ Bulan September tahun yang sama di Jamaika dia menerangkan bahwa segi paling fundamental kebijaksanaan Tanzania ialah tuntutan akan persamaan, dan secara khas dia mengatakan bahwa persamaan itu belum dicapai dengan menunjuk pada perbedaan 12 : 1 untuk gaji-gaji/upah-upah dan bahkan perbedaan yang lebih besar antara pendapatan pedesaan dan perkotaan. Dia sama jujurnya ketika melaporkan lambannya perkembangan fasilitas-fasilitas kesehatan elementer, tiadanya efisiensi perusahaan-perusahaan milik negara dan koperasi, dan pelanggaran-pelanggaran Kode Kepemimpinan.²

Dalam sebuah laporan yang disiapkan untuk merayakan hari ulang tahun Deklarasi Arusha yang ke-10, Nyerere tidak kurang terus terangnya.³ Sekalipun pengeluaran untuk mengembangkan pertanian telah meningkat sepuluh kali lipat, "kenyataannya hasil pertanian sangat mengecewakan"; di sektor industri "kenyataannya dahulu dan sekarang kita sangat tidak efisien di pabrik-pabrik dan bengkel-bengkel kita"; dan dengan bantuan luar negeri yang sebesar 59% anggaran pembangunan tahunan sekarang ini swadaya lebih merupakan suatu tujuan daripada kenyataan. Di antara segi-segi positif laporan ini adalah kemajuan dalam pendidikan, khususnya perluasan kemampuan membaca dan menulis dan banyak meningkatnya jumlah anak yang ditampung di SD dengan UPE di depan mata. Tetapi lebih penting dari angka-angka statistik itu adalah suatu perubahan dalam sikap dan nilai-nilai nasional yang dirasakan Nyerere. Dia percaya bahwa di Tanzania "seorang mulai - baru mulai - dinilai berdasarkan apa yang disumbangkannya dan bukan apa yang diperolehnya". Arus menuju tumbuhnya suatu masyarakat kelas telah dihentikan dan dibalik, dan "etika nasional kita ... mulai menjadi suatu etika sosialis". Tetapi bagaimana hari depan? Nyerere berkata: "Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk panen. Saya takut untuk kita bahwa sekarang ini masih waktu untuk menanam."

1 Pidato Julius Nyerere kembalinya dari RRC, dalam *Mbioni*, Majalah Kivikoni College, No. 8, 1975, hal. 16-17

2 *Mbioni*, loc. cit., hal. 9-11